

BAB III

DINAMIKA SIKAP CHINA DALAM KONFLIK KASHMIR

Konflik Kashmir merupakan satu-satunya konflik internasional yang sampai saat ini masih menjadi agenda PBB. Konflik yang awalnya hanya disebabkan oleh sengketa wilayah, kini menjadi semakin kompleks dengan berbagai masalah baru. Kompleksitas inilah yang menyebabkan hubungan bilateral India dan Pakistan tidak harmonis dan mengundang perhatian dari berbagai pihak, tak terkecuali China. Bab ini akan membahas tentang arti penting Kashmir dan sejarah terbentuknya konflik Kashmir, dinamika hubungan bilateral India dan Pakistan dalam konflik Kashmir, dinamika sikap China terhadap konflik Kashmir dan dinamika hubungan bilateral China dengan India dan Pakistan.

3.1 Arti Penting Kashmir

Kashmir dikenal sebagai tempat yang memiliki keindahan alam yang tidak diragukan lagi. Terletak di kaki gunung Himalaya, Kashmir merupakan sebuah *landlocked territory* dengan luas sekitar 86,023 km² dan dikelilingi oleh negara-negara besar, seperti India, Pakistan, China, dan Afghanistan. Kashmir dahulunya merujuk pada semua bagian wilayah yang berbeda dari Kerajaan Jammu dan Kashmir (Jammu, Kashmir, Ladakh, dan Baltistan). Kini, wilayah Kashmir dikontrol oleh tiga negara, yaitu India, Pakistan, dan China. India disebut sebagai Jammu dan Kashmir (J&K) dan terdiri dari wilayah Baltistan (Kargil, Drass dan Turtuk) dan mengontrol sekitar 45.62% wilayah Kashmir. Pakistan disebut sebagai *Pakistan Occupied Kashmir* (POK) yang terdiri dari wilayah utama

Baltistan yang saat ini disebut *Northern Areas* dan sebuah unit administratif yang terpisah yang bernama Azad Jammu dan Kashmir (AJK) dan mengontrol 35.155% wilayah Kashmir. Sedangkan, 19.23% wilayah Kashmir lainnya dikontrol oleh China, diantaranya wilayah Demchok, Shaksgam Valley, dan Aksai Chin. LoC membagi Jammu dan Kashmir sepanjang 778 km dan terdapat garis perbatasan sepanjang 198 km antara sebuah daerah yang merupakan bagian dari wilayah India dan daerah Punjab, Pakistan. Di wilayah Siachen terdapat garis perbatasan sepanjang 150 km yang memisahkan India dan Pakistan (Karnad, 2004).

Gambar 3.1
Peta Wilayah Sengketa Kashmir



Sumber:

http://legacy.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kashmir_disputed_2002.jpg

Bagi India, menjadikan Kashmir menjadi bagian dari wilayah kedaulatan merupakan komitmennya untuk mengembangkan prinsip sekulerisme. Kashmir memang merupakan rumah bagi mayoritas umat Muslim di kawasan Asia Selatan, namun India percaya bahwa Kashmir dapat berkembang di tengah-tengah mayoritas umat Hindu (Cheema, 2015). Arti penting Kashmir bagi India juga terletak pada fakta bahwa Kashmir merupakan tanah dari leluhur Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri pertama dan salah satu *Founding Fathers* India. Melalui fakta ini, Nehru menggunakan pengaruhnya untuk mempertahankan komitmen India terhadap wilayah Kashmir. Kemudian, India juga melihat bahwa Kashmir merupakan wilayah yang strategis. Dengan mengakuisisi wilayah Kashmir, India dapat memiliki akses ke negara-negara di bagian barat daya Kashmir. Hal ini merujuk pada tradisi hubungan India dengan negara-negara Asia Tengah dan sub-kontinen lainnya.

Secara ekonomis, Kashmir sebagai wilayah yang kaya dengan produksi kayu dan sumber dari tiga sungai yaitu Indus, Basin, Kashmir dapat memberikan keuntungan bagi sektor perekonomian India, meskipun fakta menyebutkan pada tahun 1947, akses perekonomian Kashmir dengan wilayah yang kemudian bergabung dengan Pakistan lebih besar apabila dibandingkan dengan wilayah yang bergabung dengan India setelah diberlakukannya prinsip partisi (Malik I. , 2002). Kemudian, akibat dari pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, India membutuhkan lebih banyak lagi persediaan air dan energi listrik. Perairan glasial yang mengalir melalui Kashmir akan cukup untuk menyediakan air dan pengembangan fasilitas pembangkit listrik bagi masyarakat India (Shawn Snow, 2016).

Kemudian bagi Pakistan, menjadikan wilayah Kashmir sebagai bagian dari kedaulatan negaranya merupakan hal yang sangat penting. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, para pemimpin Pakistan pun menganggap bahwa negara mereka tidak akan lengkap tanpa bergabungnya wilayah Kashmir yang memiliki persamaan dengan Pakistan, yaitu memiliki mayoritas penduduk beragama Islam (Ganguly, 2007). Selain itu, pentingnya Kashmir bagi Pakistan didasarkan pada *Two-Nation Theory*, dimana teori ini menjelaskan bahwa Hindu dan Muslim tidak akan dapat hidup secara berdampingan dalam satu wilayah negara. Adanya pengaruh India terhadap wilayah Kashmir merupakan hal yang problematik bagi Pakistan karena Kashmir merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim tetapi tidak diberikan kepada Pakistan yang menjadikan Islam sebagai identitas nasionalnya. Hal ini menjadikan isu yang akan memberikan keuntungan bagi Pakistan untuk mendapatkan dukungan secara politik (Basrur, 2008).

Kemudian dalam aspek strategis dan ekonomi, Kashmir memiliki nilai penting bagi Pakistan. Dalam aspek strategis, Kashmir memiliki akses strategis menuju China yang merupakan partner terdekat Pakistan di kawasan. Dalam aspek ekonomi, Kashmir merupakan wilayah yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Pakistan. Sungai-sungai penting seperti Indus, Jhelum dan Chenab mengalir melewati wilayah Kashmir sebelum pada akhirnya mencapai Pakistan. Ketiga sungai ini merupakan sumber irigasi bagi sektor pertanian Punjab dan Sindh dimana kedua wilayah ini merupakan tulang punggung bagi perekonomian Pakistan.

Tak hanya India dan Pakistan, Kashmir juga memiliki nilai penting bagi China. Sebagai negara yang memang bukan bagian dari kawasan Asia Selatan,

China berbagi perbatasan dengan wilayah Kashmir dan mengontrol wilayah Aksai Chin. Kashmir juga merupakan pintu gerbang menuju kawasan Asia Selatan. Bagi China, Kashmir memiliki nilai yang strategis. *Silk Route* merupakan sebuah rute yang menghubungkan China dengan Pakistan dan rute ini melewati wilayah Kashmir. Rute ini juga sangat penting bagi China dalam mempertahankan posisi militernya atas India. Selain *Silk Route*, wilayah Siachen Glacier juga memiliki nilai strategis bagi kerjasama militer China dan Pakistan (Raina, 1994). Kashmir juga merupakan rute tercepat menuju Tibet. Selanjutnya, sebagai negara yang sedang mengalami pertumbuhan dalam bidang ekonomi, Kashmir memiliki nilai ekonomis. China terus meningkatkan kerjasamanya dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dalam berbagai sektor investasi maupun ekspor-impor. China telah menanamkan investasi untuk beberapa proyek, seperti proyek energi di wilayah Azad Jammu dan Kashmir serta Gilgit-Baltistan dan proyek jalan *Trans Karakoram Highway* atau *Shaksgam Track* (Iqbal, 2010).

3.2 Sejarah Konflik Kashmir

Konflik Kashmir dimulai setelah kegagalan partisi oleh pemerintahan Inggris pada tahun 1947. Prinsip partisi ini merupakan produk dari berakhirnya kolonialisme Inggris, dimana Inggris pada saat itu menghendaki pembentukan negara India dan Pakistan. Setelah mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada Agustus 1947, wilayah kekuasaan Inggris dibagi menjadi dua, yaitu wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu menjadi negara India dan wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam menjadi negara Pakistan. Kemudian, terdapat sekitar 562 *Princely States* diberi kebebasan untuk

memilih bergabung dengan India atau Pakistan. Namun, terdapat tiga princely states yang sulit untuk menentukan pilihan, yaitu Junagadh, Hyderabad, dan Jammu-Kashmir. Junagadh merupakan sebuah princely state dengan 80% penduduknya beragama Hindu, tetapi penguasanya adalah seorang Muslim yang cenderung pro Pakistan. Namun, pada akhirnya Junagadh bergabung dengan India melalui plebisit. Kemudian, Hyderabad yang memiliki penduduk yang mayoritas beragama Hindu dengan penguasa seorang Muslim yang awalnya cenderung untuk tidak memilih baik India maupun Pakistan justru pada akhirnya bergabung dengan India dengan cara kependudukan militer (Mashad, 2004).

Sedangkan, Jammu dan Kashmir merupakan sebuah princely state yang paling luas diantara 562 *princely state* yang ada dan belum memiliki pilihan yang jelas apakah ingin bergabung dengan India atau Pakistan hingga saat ini (Bose, 2003). Menurut sensus pada tahun 1941, wilayah Jammu dan Kashmir memiliki populasi sebanyak 4.021.616 jiwa dengan mayoritas penduduknya beragama Islam atau sekitar 77%, Hindu sebanyak 21% dan selebihnya adalah Sikh dan Buddha sekitar 2% (Hussain, 2016). Masyarakat Jammu dan Kashmir yang mayoritas adalah Muslim lebih memilih untuk bergabung dengan Pakistan, sedangkan pemimpin mereka yang bernama *Maharaja Hari Singh* dan kebanyakan elite politiknya memeluk keyakinan Hindu. Mereka lebih memilih untuk bergabung dengan India. Perbedaan pilihan dan pandangan antara masyarakat dan penguasa Jammu dan Kashmir inilah yang menjadi akar dari konflik Kashmir yang menyebabkan hubungan bilateral antara India dan Pakistan tidak pernah harmonis.

3.3 Dinamika Konflik Kashmir

Konflik Kashmir dimulai saat meletusnya perang India-Pakistan tahun 1947-1948. Perang ini merupakan perang pertama antara India dan Pakistan sesaat setelah kedua negara mendapatkan kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Inggris. Penyebab perang ini adalah kegagalan prinsip partisi dari pemerintah kolonial Inggris. Krisis ini bermula di awal Oktober 1947 melalui aksi pemberontakan di wilayah Poonch, di barat daya Kashmir dan melibatkan pasukan Angkatan Darat Pakistan yang menyamar sebagai warga setempat untuk mendukung pemberontakan (Khan, 1970). Kemudian bersama dengan tentara Muslim Jammu dan Kashmir serta pasukan pemberontak, mereka bersama-sama melakukan pembantaian massal terhadap masyarakat Dogra (Hindu) dan menuju ibukota Srinagar. Mengetahui kondisi Kashmir yang sedemikian buruknya, Maharaja Hari Singh kemudian mencari perlindungan dan asistensi ke Patiala, namun bantuan yang berupa pasukan tentara Patiala mengalami kekalahan (Sen, 1988).

Kekalahan ini kemudian membuat Maharaja Hari Singh memutuskan untuk meminta bantuan pemerintah India. Pihak India kemudian mengirimkan bantuan berupa pasukan bersenjata dan sukses memukul mundur para pemberontak. Fakta lain menyebutkan bahwa awalnya, pasukan India memang berhasil merusak pertahanan pasukan pemberontakan, namun kesuksesan ini tidak bertahan lama setelah pasukan tentara Pakistan menguasai wilayah Azad Kashmir dan berhasil memukul mundur tentara India. Tahun 1948, perang semakin meningkat dengan aksi saling balas. Pihak India menyadari bahwa perang tidak dapat selesai kecuali dukungan Pakistan terhadap pasukan Azad Kashmir berhenti. Pemerintah India

kemudian berinisiatif untuk mencari penyelesaian melalui upaya gencatan senjata berdasarkan resolusi dari PBB. Pada tahun 1949 perang ini berakhir dengan menghasilkan sepertiga bagian wilayah Kashmir jatuh ke tangan Pakistan yang kemudian wilayah ini disebut dengan Azad Kashmir dan menghasilkan garis perbatasan yang memisahkan wilayah Kashmir dibawah administrasi India dan Kashmir dibawah administrasi Pakistan hingga saat ini.

Upaya gencatan senjata pada tahun 1949 dan serangkaian resolusi konflik pada kenyataannya belum memberikan hasil akhir bagi konflik Kashmir. Justru kemudian pada tahun 1965 India dan Pakistan kembali terlibat dalam sebuah konfrontasi militer yang lebih besar. Perang India dan Pakistan tahun 1965 bermula dari sebuah serangan uji coba Pakistan yang ingin menguji pertahanan India di Rann of Kutch, negara bagian Gujarat, India. Serangan ini kemudian direspon oleh pihak India dan kedua pihak melakukan aksi saling balas yang pada akhirnya memicu terciptanya strategi perang yang dikobarkan di wilayah Jammu dan Kashmir (Musa, 1983). Sepanjang bulan Agustus tahun 1965, kontak bersenjata terjadi antara pasukan militer India dan Pakistan. Kedua pihak melakukan usaha yang maksimal dalam perang ini dengan menggunakan kekuatan darat dan udara yang menimbulkan kerusakan yang merugikan masyarakat. Pasalnya, salah satu serangan udara mengarah ke sebuah bendungan di Punjab, dimana bendungan ini merupakan sumber irigasi bagi masyarakat sekitar. Perang ini merupakan perang yang membawa kerugian besar bagi India dan Pakistan. Kedua pihak banyak kehilangan pasukan dan alutsista. Kedua pihak akhirnya sepakat dengan upaya gencatan senjata dan resolusi dari Dewan Keamanan PBB, meskipun resolusi ini tidak bertahan lama. Perang ini baru benar-benar berakhir setelah adanya Deklarasi

Tashkent dengan Uni Soviet sebagai mediator untuk kedua pihak.

Kemudian pada tahun 1971 hingga tahun 1972, India dan Pakistan sebenarnya juga terlibat dalam sebuah perang karena masalah krisis di Pakistan Timur. Meskipun bukan terkait dengan sengketa wilayah Kashmir, perang ini juga melibatkan sektor area Kashmir, seperti di sektor barat dari CFL (*Ceasefire Line*), yaitu di Jammu dan Kashmir hingga ke daerah Rann of Kutch yang berada di selatan Rajasthan, Poonch, dan Chamb. Dalam perang ini, baik pihak India maupun pihak Pakistan secara maksimal mengerahkan peralatan alutsista masing-masing dan perang ini juga banyak menelan korban jiwa. Perang ini akhirnya berakhir dengan kemerdekaan Pakistan Timur yang menjadi negara Bangladesh dan kekalahan Pakistan. Selain itu, perang ini juga menghasilkan Perjanjian Simla pada tahun 1972 dimana perjanjian ini menjadi dasar dari hubungan bilateral antara keduanya dan merubah *Kashmir Ceasefire Line* menjadi *Line of Control* (LoC) serta upaya terakhir untuk penyelesaian sengketa Kashmir (BBC, 2017).

Kemudian di tahun 1980-an, konflik Kashmir kembali menunjukkan eskalasi. Pada tahun 1984 tentara India mengambil alih wilayah *Siachen Glacier*, yaitu sebuah wilayah di Kashmir yang tidak dibatasi oleh LoC. Pakistan kemudian juga melakukan upaya untuk mengambil alih wilayah itu hingga beberapa dekade berikutnya. Selanjutnya pada tahun 1987, diselenggarakan pemilu di wilayah Kashmir yang berada di bawah administrasi India. Hal ini memicu sebuah konflik dimana kelompok yang pro terhadap kemerdekaan Jammu dan Kashmir yang berada di sekitar JKLF atau *Jammu and Kashmir Liberation Front* melakukan pemberontakan. India menuduh Pakistan telah memicu pemberontakan ini dengan

membiarkan para pejuang kemerdekaan melintasi LoC. Kemudian sejak tahun 1989, urgensi konflik Kashmir mulai meningkat dengan munculnya para militan bersenjata, pemberontakan, dan kekerasan.

Hingga memasuki dekade tahun 1990-an, kondisi Kashmir semakin menunjukkan keprihatinan. Awal tahun 1990, terjadi telah terjadi peristiwa pembantaian terhadap para demonstran Kashmir di jembatan Gawkadal, Srinagar yang dilakukan oleh tentara India. Pembantaian ini merupakan yang terburuk setelah sebelumnya terjadi juga pembantaian Bijbehara (Schofield, 2000). Selanjutnya, pemberontakan berlanjut setelah adanya pelatihan militan Kashmir di India dan Pakistan yang kemudian mengerahkan para militan ini menuju Jammu dan Kashmir. Hal ini menimbulkan korban warga sipil di kedua pihak. Konflik Kashmir semakin menunjukkan kompleksitasnya tatkala pada tahun 1998 kedua negara melakukan uji coba nuklir. Kemudian tahun 1999, India dan Pakistan kembali terlibat dalam sebuah konflik yang bernama konflik Kargil. Konflik ini bermula setelah para militan yang dicurigai adalah para tentara Pakistan yang menyamar sebagai militan Kashmir menyebrang dari wilayah Kashmir di wilayah administrasi Pakistan melintasi wilayah Kargil, dimana wilayah ini berada di bawah administrasi India.

Hingga abad ke-21, konflik Kashmir tidak hanya seputar sengketa wilayah. Dewasa ini, Kashmir identik dengan aksi terorisme, kekerasan, bentrok, dan demonstrasi massa. Kebanyakan dari aksi-aksi ini melibatkan pihak militan, tentara, dan penduduk Kashmir itu sendiri. Tahun 2001-2002, India dan Pakistan terlibat konfrontasi militer di sepanjang LoC di wilayah Kashmir. India mengawasi konfrontasi ini sebagai respon terhadap penyerangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata *Lashkar-e-Taiba* dan *Jaish-*

e-Mohammad di instansi pemerintahan Srinagar. Tahun 2003, sebuah operasi militer yang bernama *Operation Sarp Vinash* diinisiasi oleh tentara India. Operasi ini menargetkan jaringan teroris yang berbasis di area Pir Panjal dan sebanyak 65 teroris dinyatakan tewas (Devesh Kumar, 2003). Masih di tahun 2003, India dan Pakistan kemudian kembali menjalin hubungan diplomatik. Upaya ini dimulai dengan akses transportasi Delhi-Lahore yang kembali berfungsi setelah sempat berhenti beroperasi sejak terjadinya serangan tahun 2001 (Ayanjit Sen, 2001). Tahun berikutnya, PM Manmohan Singh dan Presiden Musharraf melakukan pertemuan di sela-sela Konferensi Majelis Umum PBB di New York. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi atas krisis antara kedua negara mengenai Kashmir. Hingga tahun 2006, keduanya masih melakukan beberapa pertemuan bilateral untuk membahas penyelesaian konflik Kashmir.

Tahun 2008, dari terjadi demonstrasi besar di Srinagar yang disebabkan oleh ditemukannya pemakaman massal. Para demonstran terlibat bentrok dengan pihak kepolisian dan menuntut agar dilakukan investigasi lebih lanjut. Tahun 2011, otoritas India melakukan investigasi terkait dengan penemuan pemakaman massal. Melalui tim *Jammu and Kashmir State Human Rights Commission* (SHRC), India berhasil menemukan sekitar 2.730 tubuh terkubur di 38 pemakaman massal berbeda di wilayah Baramulla, Bandipora, Handwara, dan Kupwara. Investigasi ini berlanjut hingga tahun 2012 (Human Rights Watch, 2011). Masih di tahun yang sama, India dan Pakistan kembali terlibat dalam baku tembak di LoC. Sebanyak tiga tentara Pakistan tewas dan pihak India mengklaim bahwa Pakistan lah penyebab dari peristiwa baku tembak tersebut. Menjelang akhir tahun 2013, PM Narendra Modi dan PM Nawaz Sharif bertemu dalam

rangka untuk menemukan penyelesaian atas konflik Kashmir dan kedua pihak setuju untuk berusaha untuk mengurangi insiden kekerasan di sepanjang garis perbatasan.

Tahun berikutnya, pihak India dan Pakistan kembali menginisiasi pertemuan bilateral. Namun, pihak India membatalkan pertemuannya dengan pihak Pakistan dan menyatakan bahwa Pakistan telah mengintervensi urusan dalam negeri India. Pernyataan ini muncul setelah Pakistan diketahui juga melakukan pertemuan dengan para pemimpin separatist masyarakat Kashmir sebelumnya. Masih di tahun 2014, India dan Pakistan saling memberikan ancaman setelah tindakan kekerasan kembali terjadi di garis perbatasan dan menyebabkan setidaknya 18 orang tewas dalam insiden ini. Tahun 2015, terjadi sebuah protes terhadap kunjungan PM Modi di Jammu dan Kashmir. Satu orang dinyatakan tewas dalam insiden ini. Tahun 2016, terjadi sebuah penyerangan terhadap basis militer India di wilayah Uri yang dilakukan oleh sekelompok militan bersenjata. Penyerangan ini kemudian dikenal dengan *Uri Attack* dan menjadi penyerangan yang terburuk dalam dua dekade. Dilaporkan bahwa 17 tentara dinyatakan tewas dan puluhan lainnya mengalami luka. Hingga tahun 2017, kedua negara masih terlibat dalam beberapa peristiwa kekerasan, seperti bentrokan yang terjadi di sepanjang LoC yang melibatkan pasukan militan dan menjadikan tentara-tentara perbatasan sebagai target.

3.4 Dinamika Sikap China Dalam Konflik Kashmir

Dalam konflik Kashmir, China menerapkan bentuk sikap yang berbeda-beda dari waktu ke waktu dan merupakan refleksi dari kebijakan luar negerinya terhadap kawasan Asia Selatan. Dimulai sejak awal dekade 1950-an, China menerapkan sikap netral

terhadap konflik Kashmir. Tahun 1953, ketika India dan Pakistan menginisiasi dialog untuk menemukan penyelesaian terhadap konflik Kashmir, salah satu media massa China, *The People's Daily* mengatakan bahwa China menyambut baik hal ini dan berharap bahwa dialog ini tidak melibatkan PBB. China beranggapan bahwa PBB adalah perantara bagi Amerika Serikat untuk menjadikan wilayah Kashmir sebagai wilayah koloni dan basis militer (Ziring, 1990). Tahun 1956, melalui sebuah *press conference* di Calcutta dan Pakistan, PM Zhou Enlai menyatakan bahwa konflik Kashmir merupakan konflik bilateral antara India dan Pakistan serta berharap bahwa pihak India dan Pakistan dapat menyelesaikan konflik diantara keduanya (Bajpai, 1999).

Kemudian di awal tahun 1957, PM Zhou Enlai melakukan kunjungan ke Ceylon (kini bernama Sri Lanka) dan sepakat untuk memberikan sebuah pernyataan bersama dengan PM S.W.R.D Bandaranaike bahwa India dan Pakistan harus menyelesaikan konflik Kashmir secara bilateral melalui upaya perdamaian (Korbel, 1966). Sikap netral China semakin jelas ketika PM Zhou Enlai menerima kunjungan duta besar Ahmed dan menerima surat dari PM Suhrawady. Dalam pertemuan ini, PM Zhou Enlai menjelaskan bahwa dirinya sempat menjadi mediator untuk India dan Pakistan saat melakukan kunjungan ke kedua negara. Menurutnya, India dan Pakistan sedang mengalami krisis kepercayaan satu sama lain. Pakistan mengklaim bahwa pihaknya meningkatkan sektor pertahanannya sebagai upaya pencegahan atas serangan India. Sebaliknya, India juga mengatakan bahwa pihaknya berjanji untuk tidak memulai penyerangan, tetapi India juga memiliki kekhawatiran bahwa Pakistan akan memulai konfrontasi setelah memperkuat pertahanannya. PM Zhou Enlai juga menegaskan bahwa keterlibatan pihak barat, terutama

PBB akan semakin memperburuk konflik. Ia menambahkan bahwa resiko dari keterlibatan PBB dalam konflik Kashmir juga akan mengindikasikan peran Amerika Serikat di dalamnya (Wilson Center, 2018).

Di akhir dekade 1950-an, sikap China terhadap konflik Kashmir perlahan mulai berubah. Hal ini dipicu oleh masalah perbatasan yang terjadi antara China dan India pada tahun 1959 yang akhirnya menyebabkan keduanya terlibat dalam sebuah krisis terbuka pada tahun 1962. Sikap China kemudian mulai menunjukkan keberpihakannya kepada Pakistan. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tahun 1964 ketika PM Zhou Enlai melakukan kunjungan ke Pakistan dan mendeklarasikan dukungannya terhadap upaya penyelesaian konflik Kashmir berdasarkan keinginan masyarakat Kashmir seperti yang telah dijanjikan oleh pihak India dan Pakistan (Arif, 1980). Tahun berikutnya, tepatnya pada Maret 1965, ketika Ayub Khan melakukan kunjungan kenegaraan ke China, baik pihak China maupun Pakistan memberikan pernyataan bersama berupa dukungan terhadap upaya *self-determination* masyarakat Kashmir. China juga menyatakan bahwa konflik Kashmir harus diselesaikan menurut pedoman dari resolusi Dewan Keamanan PBB (Sattar, 2001).

Perubahan sikap China yang selanjutnya dapat dilihat saat perang tahun 1965 antara India dan Pakistan. Sikap China berubah dengan memberikan keberpihakan penuh terhadap Pakistan selama perang tahun 1965. Tercatat selama krisis tahun 1965, China setuju untuk memberikan bantuan militer kepada Pakistan sebesar USD 335 juta (Central Intelligence Agency, 1973) meskipun pada akhirnya bantuan ini tidak mampu menahan kekalahan Pakistan. Hingga pertengahan September 1965, China masih secara

konsisten memberikan dukungan secara politik terhadap Pakistan dan *self-determination* masyarakat Kashmir. Dukungan ini berlanjut hingga akhir tahun 1960-an. Kemudian, di awal dekade 1970-an, China masih memberikan dukungan untuk upaya *self-determination* masyarakat Kashmir. China juga masih menunjukkan keberpihakannya kepada Pakistan dengan memberikan dukungan secara politik kepada Pakistan selama krisis tahun 1971 di Pakistan Timur. China beranggapan bahwa krisis yang terjadi di Pakistan Timur merupakan sebuah masalah internal Pakistan dan mengancam keterlibatan India dan Uni Soviet.

Akhir dekade 1970-an, sikap China terhadap konflik Kashmir kembali netral setelah Deng Xiaoping mengambil alih pemerintahan China. Di era ini, China yang berada di bawah lebih fokus untuk melakukan modernisasi ekonomi. Selain itu, China juga memberlakukan kebijakan *open door policy*, dimana China bersedia untuk membuka diri terhadap globalisasi dan siap untuk menjalin relasi dengan lebih banyak negara. Kebijakan ini kemudian membawa China untuk menormalisasi hubungan bilateralnya dengan India yang sempat mengalami penurunan akibat krisis tahun 1962. Secara tidak langsung, sikap China di era ini justru sedikit menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan bilateral China dan Pakistan. Pasalnya, China menyarankan bahwa India dan Pakistan harus menyelesaikan konflik Kashmir secara bilateral berdasarkan Perjanjian Simla dan resolusi dari PBB untuk memenuhi tuntutan India (Jain, 1989).

Hingga tahun 1990-an, sikap China semakin netral dalam konflik Kashmir. Dukungan China terhadap keduanya juga semakin seimbang dan tidak menyarankan agar India dan Pakistan mengadopsi resolusi PBB dalam penyelesaian konflik Kashmir,

melainkan dengan melalui dialog. Tahun 1996, ketika presiden Jiang Zemin melakukan kunjungan kenegaraan di Pakistan dan berpidato di depan Senat Pakistan, ia sama sekali tidak membahas tentang konflik Kashmir. Ia menyarankan agar India dan Pakistan mulai meningkatkan hubungan bilateral antara keduanya, terutama dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan (Jiang Zemin, 1996). Tahun 1998 terjadi uji coba nuklir India dan Pakistan. Hal ini telah memicu eskalasi konflik Kashmir dan menyebabkan penurunan terhadap hubungan bilateral China dan India. Menanggapi hal ini, sikap China masih tetap netral.

Kemudian, pada tahun 1999 ketika India dan Pakistan terlibat dalam krisis Kargil, sikap China justru lebih netral. China meminta pihak India dan Pakistan untuk menghormati LoC dan menyelesaikan krisis Kargil melalui upaya negosiasi bilateral untuk mencegah eskalasi konflik. Sikap China bahkan masih tetap netral tatkala Pakistan secara aktif mencari dukungan China untuk posisinya dalam konflik Kargil, misalnya saat menteri luar negeri Pakistan Sartaj Aziz melakukan kunjungan kenegaraan ke China pada Juni 1999, menteri luar negeri China, Tang Jiaxuan menjelaskan bahwa krisis yang terjadi telah menarik perhatian komunitas internasional dan konflik Kashmir hanya dapat diselesaikan melalui cara yang damai. Masih dalam waktu yang berdekatan, PM Pakistan, Nawaz Sharif kembali melakukan kunjungan kenegaraan dan kembali mencari dukungan China. Sekali lagi China menegaskan bahwa tidak ada dukungan militer bagi Pakistan

Hingga awal abad ke-21, sikap China masih netral dalam konflik Kashmir, namun peristiwa 9/11 yang terjadi di Amerika Serikat pada kenyataannya telah meningkatkan isu keamanan internasional dan terorisme. China lantas lebih meningkatkan peran

aktifnya pada level diplomatik untuk memastikan perdamaian kawasan. Tahun 2001 hingga 2002, hubungan bilateral India dan Pakistan kembali memburuk. Hal ini disebabkan oleh penyerangan terhadap instansi pemerintahan di New Delhi dan Srinagar yang dilakukan oleh kelompok militan. China menyarankan agar India dan Pakistan menyelesaikan masalah melalui jalur damai. China melalui kementerian luar negerinya memberikan pernyataan sebagai berikut:

“China’s position on the issue of Kashmir has been clear cut. We have always maintained that the Kashmir issue is one between India and Pakistan left over by history. China hopes that the two sides should seek new ways to appropriately solve the problem through peaceful exchanges and negotiations and refrain from military conflicts” (Embassy of People's Republic of China in The Hellenic Republic, 2004).

Kemudian pada tahun 2006, China menyatakan bahwa pihaknya mendukung India dan Pakistan untuk melaksanakan dialog untuk menemukan penyelesaian atas konflik Kashmir. Pernyataan ini disampaikan oleh presiden Hu Jintao kepada presiden Pakistan, Pervez Musharraf ketika melakukan kunjungan kenegaraan di China (Dawn, 2006). Hingga tahun 2009, China masih konsisten menyatakan bahwa konflik Kashmir merupakan isu bilateral antara India dan Pakistan. China berharap agar kedua pihak dapat menyelesaikan konflik melalui dialog dan konsultasi. Pernyataan ini juga merupakan respon terhadap pernyataan Mirwaiz Umar Farooq, pemimpin *All Parties Hurriyat* yang menyatakan bahwa meskipun China bukanlah bagian dari konflik Kashmir, China memiliki peran khusus dalam menjaga perdamaian di kawasan Asia Selatan, terutama di Kashmir karena China juga mengontrol sebagian dari wilayah Kashmir (Dawn, 2009).

Hingga Xi Jinping resmi menjadi presiden China menggantikan Hu Jintao, China mulai meningkatkan pengaruhnya dalam konflik Kashmir. Diawali dengan kunjungannya ke India dan Pakistan pada tahun 2014 dan 2015 lalu, China mulai untuk mempromosikan rencana pembangunan bersama dalam kerangka Belt and Road Initiative yang termasuk di dalamnya yaitu proyek CPEC yang melewati wilayah Pakistan Occupied Kashmir sebagai bagian dari kebijakannya terhadap konflik dan sengketa internasional melalui pendekatan yang kooperatif atau melalui kerjasama. Bersamaan dengan proyek besar ini, pada tahun 2016, wakil menteri luar negeri China, Liu Zhenmin mengatakan bahwa China ingin pihak-pihak yang berkonflik, yaitu India dan Pakistan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi melalui konsultasi dan China menekankan bahwa pihaknya semakin fokus dengan situasi terkini di Kashmir (Chansoria, 2016). Masih di tahun yang sama, ketika tensi konflik meningkat kembali di wilayah Uri, China melalui juru bicara kementerian luar negerinya, Lu Kang menyatakan sikapnya:

“We are shocked by this attack and express our deep sympathy and condolences to the bereaved families and the injured. China firmly opposes and strongly condemns all forms of terrorism. We are concerned about such rising temperature surrounding the Kashmir region, and hope that all relevant parties can resolve differences through dialogue and consultation, enhance counter-terrorism cooperation and jointly maintain peace and security of the region.” (Ministry of Foreign Affairs of The People’s Republic of China, 2016)

Dalam hal ini, China semakin fokus terhadap meningkatnya intensitas konflik yang terjadi di Kashmir, khususnya kasus-kasus kekerasan yang menjadi sorotan dalam konflik Kashmir yang melibatkan kelompok-kelompok militan dan

menjadikan tentara-tentara perbatasan sebagai target. Hingga pertengahan tahun 2017 krisis kembali terjadi di sepanjang LoC dan China melalui kementerian luar negerinya menyatakan:

“The situation of Kashmir has drawn the attention of the international community. Both Pakistan and India are important countries in South Asia. The conflict between two countries along the Line of Control in Kashmir is neither conducive to their own stability and development nor regional peace and tranquility. China hopes relevant parties to do more to help with regional peace and stability and refrain from escalating the tension. China stands ready to play a constructive role to improve the relations between Pakistan and India.” (Ministry of Foreign Affairs of The People's Republic of China, 2017)

Dalam pernyataan tersebut, China siap untuk memainkan peran konstruktif dengan membantu India dan Pakistan untuk meningkatkan hubungan bilateral keduanya. Pernyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa China memang ingin membantu India dan Pakistan dalam mempercepat upaya penyelesaian atas konflik Kashmir, karena dengan meningkatnya hubungan bilateral India dan Pakistan, secara otomatis penyelesaian konflik Kashmir akan segera tercapai. Selain itu, China juga menyatakan bahwa India dan Pakistan adalah negara-negara kawasan Asia Selatan yang penting dan berpengaruh, sehingga dengan meningkatnya situasi di Kashmir secara otomatis telah menarik perhatian komunitas internasional dan mengganggu stabilitas serta perdamaian kawasan (The Economic Times, 2017).

3.5 Dinamika Hubungan Bilateral China dan India

Hubungan bilateral antara China dan India sebenarnya sudah dimulai sejak abad kedua sebelum masehi dimana interaksi antara keduanya pun hanya

sebatas interaksi budaya dan perdagangan antara kekaisaran China dengan India. Interaksi politik keduanya terjadi baru di pertengahan abad ke-19. Berikut dinamika hubungan bilateral antara India dan China dalam berbagai masa kepemimpinan presiden China sejak era Mao Zedong hingga era Xi Jinping:

A. Dinamika Hubungan Bilateral China dan India Era Mao Zedong (1949-1976)

Sesaat setelah kemerdekaan India, China juga memproklamkan diri sebagai negara Republik Rakyat China pada tahun 1949 di bawah pemerintahan Mao Zedong. India pada saat itu juga merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaan China. Kemudian pada tahun 1950, hubungan bilateral antara keduanya dimulai dan atas dasar sesama negara dunia ketiga yang mengancam adanya imperialisme. Hubungan bilateral China dan India semakin erat tatkala keduanya bergabung dalam KAA yang dilaksanakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. China dan India beserta 29 negara lainnya mengadopsi *Ten Principles of Bandung* (Zhu, 2011). Namun, di tahun 1959-an hubungan kedua negara mulai menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan oleh isu perbatasan antara kedua negara di Tibet. India memberikan dukungan kepada para pemberontak Tibet yang melakukan aksi protes terhadap administrasi China pada saat itu. Peristiwa ini menimbulkan sebuah konflik yang menelan korban jiwa. Kemudian di awal tahun 1960 perdana menteri Zhou Enlai melakukan diskusi dengan perdana menteri Jawaharlal Nehru untuk membahas sengketa perbatasan antara keduanya. Namun diskusi ini tidak membawa perubahan apapun. Tahun 1962 India melancarkan serangan untuk melawan China di sepanjang area perbatasan. Akibat dari perang ini hubungan bilateral keduanya memburuk selama

balasan tahun. Kemudian sekitar tahun 1976 kedua negara mulai untuk membangun hubungan diplomatik dan sekaligus menjadi momentum dibukanya kembali relasi ekonomi dua negara.

B. Dinamika Hubungan Bilateral China dan India Era Deng Xiaoping (1978-1990)

Pada era Deng Xiaoping hubungan bilateral China dan India ditandai dengan kunjungan para petinggi dari kedua negara yang dimulai tahun 1979 ketika menteri luar negeri India, Vajpayee melakukan kunjungan kenegaraan ke China dan wakil perdana menteri China, Huang Hua melakukan kunjungan balasan ke India pada tahun 1981. Kemudian di tahun 1984 China dan India juga menandatangani perjanjian perdagangan. Di akhir tahun 1988, kunjungan perdana menteri India, Rajiv Gandhi menunjukkan peningkatan hubungan bilateral antara keduanya. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak sepakat akan menjaga perdamaian di sepanjang area *Line of Actual Control* (LAC) dengan prinsip "*mutual understanding and accommodation and mutual adjustment*". Selain itu, kedua negara juga memutuskan lebih meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan, sains dan teknologi serta menandatangani kerjasama di bidang penerbangan (Embassy of The People's Republic of China in India, 2004).

C. Dinamika Hubungan Bilateral China dan India Era Jiang Zemin (1990-2002)

Pada 1990-an, tepatnya di era pemerintahan presiden Jiang Zemin, hubungan bilateral antara keduanya semakin menunjukkan peningkatan. Kedua negara saling mengirimkan perwakilan untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan menyepakati

beberapa perjanjian. Misalnya saja pada tahun 1993 kedua negara menandatangani “*Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquillity Along the Line of Actual Control*” dalam rangka meningkatkan perdamaian sepanjang garis perbatasan China dan India, serta tahun 1994 kedua negara juga menandatangani perjanjian kerjasama di berbagai bidang, diantaranya pajak, kesehatan hingga MoU tentang penyederhanaan prosedur permohonan visa dan kerja sama perbankan. Kemudian pada November 1995 kedua negara juga melakukan pembongkaran terhadap pos-pos perbatasan di daerah Wangdong guna menciptakan situasi di area perbatasan lebih stabil. Di akhir tahun 1996 presiden Jiang Zemin yang melakukan kunjungan kenegaraan ke India menandatangani “*Agreement on Confidence Building Measures in the Military Field along the Line of Actual Control*” dengan pemerintah India. Perjanjian ini merupakan sebuah langkah penting untuk membangun rasa saling percaya antara kedua negara. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kepala negara China ke India sejak keduanya memperbaiki hubungan diplomatik dan kedua negara sepakat untuk meningkatkan hubungan berdasarkan prinsip-prinsip dari *Five Principles of Peaceful Coexistence* untuk menghadapi tantangan abad ke-21.

Kemudian setelah uji coba nuklir India pada tahun 1998, hubungan keduanya kembali memburuk (Garver J. W., 2001) dan baru tahun berikutnya, menteri luar negeri India, Jaswant Singh melakukan kunjungan kenegaraan ke China dalam rangka memperbaiki hubungan bilateral antara keduanya. Kemudian, di awal abad 21, tepatnya pada tahun 2000, Presiden India, K. R. Narayanan melakukan kunjungan ke China selama bulan Mei hingga Juni dan PM Zhu Rongji melakukan kunjungan ke India pada tahun 2002. Hal ini menandai kembali dimulainya kunjungan

kenegaraan oleh kepala negara antara China dan India (Ministry of External Affairs of India, 2016).

D. Dinamika Hubungan Bilateral China dan India Era Hu Jintao (2002-2012)

Memasuki era pemerintahan presiden Hu Jintao, hubungan bilateral China dan India masih berlanjut. Pada tahun 2003, PM Vajpayee melakukan kunjungan kenegaraan ke China dan kedua negara sepakat dalam "*Declaration on Principles for Relations and Comprehensive Cooperation*". Dokumen ini menandai peningkatan hubungan bilateral dan menghasilkan perjanjian perdagangan perbatasan di daerah Sikkim dan Tibet. Kemudian di tahun 2005, melalui perdana menteri kedua negara, China dan India sepakat dalam pernyataan bersama dalam kerangka "*Strategic and Cooperative Partnership for Peace and Prosperity* dan *Political Parameters and Guiding Principles*". Tahun 2006, PM Wen Jiabao melakukan kunjungan ke India dan kunjungan ini sebagai penanda bahwa tahun 2006 merupakan tahun persahabatan bagi China dan India untuk menyelesaikan isu perbatasan dengan menyepakati menyepakati sebuah MoU dalam bidang kerjasama pertahanan. Akhir tahun 2006, Presiden Hu Jintao melakukan kunjungan ke India dan menghasilkan sebuah deklarasi bersama yang bernama "*Joint Declaration containing a ten-pronged strategy to intensify cooperation in all areas and to give greater content to India-China Strategic and Cooperative Partnership*".

Selain itu, kerjasama perdagangan kedua negara pun mencapai angka US\$25 milyar dan menjadikan China sebagai partner terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Awal tahun 2007, kedua negara melakukan dialog untuk menyelesaikan isu perbatasan dan

menggunakan kerangka “*Agreement on Political Parameters and Guiding Principles*”. Tahun 2007 juga dikenal sebagai tahun persahabatan China-India dalam sektor pariwisata sebagai upaya untuk memperkuat kerjasama budaya. Awal tahun 2008, kedua negara juga menyepakati sebuah dokumen yaitu “*A Shared Vision for the 21st Century of the Republic of India and the People's Republic of China*” (Bhasin, 2008). Masih di tahun 2008, perekonomian dunia saat itu sedang berada dalam krisis, namun perekonomian China justru tumbuh. China mampu menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai partner dagang terbesar India dengan angka perdagangan China dan India tahun 2008 mencapai US\$51.8 milyar.

Tahun 2009, Presiden Hu Jintao bertemu dengan PM Manmohan Singh melakukan pertemuan di sela-sela KTT SCO (*Shanghai Cooperation Organisation*) dan terlibat dalam KTT BRICS di Yekaterinburg, Russia. PM Wen Jiabao juga bertemu dengan PM Manmohan Singh selama KTT East Asian Leaders di Hua Hin dan Konferensi UNCC. Pertengahan tahun 2009 hubungan bilateral kedua negara sempat mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh isu perbatasan di wilayah Arunachal Pradesh, pemberlakuan visa terpisah Jammu dan Kashmir, dan pembangunan akses di wilayah POK (Mehraj Uddin Gojree , 2014). Akhir tahun 2010, PM Wen Jiabao melakukan kunjungan kenegaraan ke India dalam rangka memperbaiki kembali hubungan bilateral. Kedua negara juga menegaskan kembali untuk meningkatkan hubungan bilateral berdasarkan beberapa perjanjian yang telah kedua negara sepakati di tahun-tahun sebelumnya (Ministry of External Affairs Government of India, 2010). Tahun 2011, China dan India mendeklarasikannya sebagai “*Year of China-India Exchange*” karena intensitas pertemuan dan

kunjungan kenegaraan kedua negara meningkat, seperti kunjungan ketiga Menteri wilayah negara bagian Bihar, Madhya Pradesh dan Gujarat ke China, dan kunjungan delegasi China ke India yang mencapai 500 delegasi, kunjungan beberapa kementerian India ke China.

E. Dinamika Hubungan Bilateral China dan India Era Xi Jinping (2012-2017)

Hingga pemerintahan China berada di era Xi Jinping, hubungan bilateral China dan India semakin menunjukkan peningkatan. Pertengahan tahun 2013, PM Li Keqiang melakukan kunjungan kenegaraan ke India, tepatnya di New Delhi dan Mumbai. Beberapa proposal berhasil disetujui oleh kedua pihak, termasuk proposal untuk menjadikan tahun 2014 sebagai tahun "*Year of Friendly Exchanges*". Mantan PM Manmohan Singh juga melakukan kunjungan resmi ke China pada tanggal 22-24 Oktober. Kunjungan ini menghasilkan beberapa perjanjian, salah satunya adalah perjanjian *Sister-City* antara Delhi-Beijing, Kolkata-Kunming dan Bangalore-Chengdu. Pertengahan tahun 2014, Wakil Presiden India juga melakukan kunjungan kenegaraan ke China dan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Kedua negara juga memperingati 60 tahun *Panchsheel* dan mengunjungi Xian. Pada tanggal 17-19 September 2014, Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke India. Sebanyak 16 perjanjian yang terbagi dalam beberapa sektor kerjasama berhasil disepakati oleh kedua pihak. Kedua pihak juga menyepakati sebuah MoU tentang pembukaan rute baru menuju Kailash Mansarovar Yatra melalui Nathu La (Ministry of External Affairs of India, 2016).

Sejak tahun 2015, kedua negara juga memperkuat kerjasama strategis dalam rangka mewujudkan perdamaian dan kemakmuran kedua negara. Pertengahan 2015, PM Modi bertemu dengan

Presiden Xi Jinping di Xian sebagai simbol terbukanya hubungan bilateral China dan India setelah PM Modi menjadi Perdana Menteri baru India. Pertemuan ini menghasilkan sebanyak 24 perjanjian antar pemerintah, 26 MoU dalam sektor bisnis, dan 2 kesepakatan bersama, salah satunya dalam isu perubahan iklim. Pemerintah India juga menjanjikan fasilitas perpanjangan e-visa bagi China. Selain itu, kerjasama ekonomi kedua negara juga tumbuh. Tercatat bahwa 21 CEO dari perusahaan-perusahaan besar China dan 40 CEO dari India menghadiri forum bisnis dimana forum ini menghasilkan komitmen bagi kedua negara untuk saling menanamkan investasi. China menanamkan investasi sebesar US\$22 milyar dan India sebesar US\$20 milyar dalam berbagai proyek industri dan infrastruktur (Netajee Abhinandan, 2016). Sesaat setelah kunjungan PM Modi ke China, kedua negara juga mengadakan pertemuan bilateral di sela-sela KTT BRICS yang diselenggarakan di Ufa, Russia.

Tahun 2016, pertemuan bilateral kedua negara masih berlanjut. Presiden Pranab Mukherjee melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing dan Guangdong. Kunjungan ini menghasilkan 10 MoU dalam sektor pendidikan dan pertukaran pelajar. Kedua negara juga terlibat dalam KTT G20 di Hangzhou dan KTT BRICS di Goa. PM Modi dan Presiden Xi Jinping juga mengadakan pertemuan bilateral di sela-sela KTT SCO di Tashkent. Sepanjang tahun 2015-2016 China dan India juga meningkatkan kerjasama dalam bidang pertahanan, keamanan serta terorisme. Sebanyak delapan dialog mengenai sektor pertahanan dan keamanan dan enam kali latihan militer bersama berhasil kedua negara lakukan. Selain itu, kedua negara juga meningkatkan kerjasama pertahanan di wilayah perbatasan dengan menjunjung nilai-nilai perdamaian. Kunjungan pimpinan militer kedua negara juga menandai pentingnya kerjasama dalam memperkuat

sektor militer China dan India serta dalam rangka meningkatkan perdamaian dan stabilitas area perbatasan (Ministry of Foreign Affairs of The People's Republic of China, 2017).

Selain itu, angka perdagangan kedua negara pada tahun 2016 mencapai US\$71.08 milyar atau defisit sebanyak 0.67%. Pencapaian ini meliputi ekspor India sebesar US\$11.75 milyar atau defisit 12,29% dan ekspor China sebesar US\$59.43 milyar atau surplus 2.01%. China masih menjadi partner terbesar India, sedangkan India menduduki peringkat ke-7 tujuan ekspor China dan peringkat ke-27 importir bagi China (Embassy of India in Beijing, 2018). Tahun 2017 merupakan tahun dimana hubungan bilateral China dan India sempat menurun. Meskipun kedua negara sebelumnya terlibat dalam KTT SCO di Astana pada tanggal, beberapa saat setelah konferensi tersebut diselenggarakan, kedua negara terlibat dalam sebuah konflik di wilayah Doklam. Doklam adalah wilayah sengketa antara tiga negara, yaitu China, Bhutan, dan India. Konflik ini bermula ketika tentara China mulai memperlebar pembangunan jalan di wilayah sengketa dan India kemudian mencoba untuk menghentikan aktivitas ini. India menganggap bahwa aktivitas pembangunan ini ilegal. Hubungan kedua negara sempat mengalami penurunan hingga pada bulan Agustus keduanya mengakhiri konflik ini. September 2017, kedua negara terlibat dalam KTT BRICS di Xiamen. Presiden Xi Jinping dan PM Modi juga melakukan pertemuan bilateral. Dalam pertemuan ini, kedua negara membahas krisis Doklam dan sepakat untuk menjaga perdamaian perbatasan untuk kebaikan hubungan bilateral China dan India. Kemudian dalam sektor perdagangan bilateral, angka perdagangan kedua negara mencapai angka US\$84.44 milyar atau meningkat sebesar 18.63% dari tahun sebelumnya.

3.6 Dinamika Hubungan Bilateral China dan Pakistan

Seperti halnya hubungan bilateralnya dengan India, hubungan bilateral China dan Pakistan juga mengalami dinamika yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Namun, hubungan bilateral China dan Pakistan awalnya tidak sebaik hubungan bilateral China dan India. Sesaat setelah kemerdekaannya, Pakistan memilih untuk berada di aliansi blok barat, dimana hal ini sangat bertentangan dengan China yang pada saat itu justru sangat kontra. Keanggotaan Pakistan dalam pakta-pakta yang didukung oleh Amerika Serikat seperti CENTO dan SEATO secara otomatis membuat China lebih memilih India sebagai partner terdekatnya di kawasan Asia Selatan. Berikut dinamika hubungan bilateral antara India dan China dalam berbagai masa kepemimpinan presiden China sejak era Mao Zedong hingga era Xi Jinping:

A. Dinamika Hubungan Bilateral China dan Pakistan Era Mao Zedong (1949-1976)

Hubungan bilateral kedua negara baru dimulai pada tahun 1950-an ketika Pakistan mengakui negara Republik Rakyat China. Tahun berikutnya, China dan Pakistan mulai membangun hubungan bilateral. Hal ini diawali oleh kunjungan *Charge d' Affaires* Pakistan di Beijing dimana kedua pihak memulai sebuah negosiasi sebagai awal dari hubungan diplomatik. China dan Pakistan juga saling menempatkan duta besar masing-masing. China menempatkan Han Nianlong di Karachi pada bulan September dan dua bulan kemudian Pakistan juga menempatkan Maj. Gen. N.A.M. Raza di Beijing. Tahun 1955, PM Mohammad Ali Bogra mengadakan pertemuan bilateral dengan PM Zhou Enlai di sela-sela KAA di Bandung, Indonesia. Pertemuan ini kemudian menjadi dasar dari hubungan

China dan Pakistan. Kedepannya, kedua negara juga sepakat untuk memperkuat hubungan bilateral.

Sejak hubungan China dan India mulai menurun di akhir tahun 1950-an akibat masalah Tibet, hubungan bilateral China dan Pakistan semakin meningkat. Tahun 1963 dan 1964, China dan Pakistan mulai menyetujui beberapa kerjasama dan perjanjian, misalnya: kerjasama perdagangan bilateral, perjanjian dalam masalah perbatasan kerjasama penerbangan dengan rute Karachi dan Dhaka menuju Canton dan Shanghai serta meningkatkan hubungan dengan negara-negara kawasan. Tahun 1965, China dan Pakistan menyetujui perjanjian pertukaran budaya di Rawalpindi dan sepakat untuk menyusun agenda pertukaran budaya tahunan (ISSI, 2017). Masih di tahun 1965, China memberikan dukungan penuh baik secara material maupun politik kepada Pakistan saat krisis India-Pakistan mengenai Kashmir. Tahun 1969 China menyuplai peralatan alutsista senilai ₹15 juta untuk industri alat berat di Taxila, Punjab.

Tahun 1971, Pakistan menjadi mediator dalam memperbaiki hubungan bilateral China dan Amerika Serikat. Sebagai hasilnya, Penasehat Keamanan Nasional AS, Henry Kissinger melakukan kunjungan ke China. Akhir tahun 1971, ketika krisis terjadi di Pakistan Timur, China memberikan dukungan secara politik kepada Pakistan. Tahun 1972, Presiden Zulfikar Ali Bhutto melakukan kunjungan resmi ke China. Kunjungan ini menghasilkan kesepakatan pinjaman sebesar US\$110 juta untuk Pakistan dan di pertengahan tahun 1972, China mengirimkan pesawat tempur 60 MiG-19 dan tank 100 T-54 dan T-59. Pertengahan tahun 1976, PM Zulfikar Ali Bhutto melakukan kunjungan ke China dan sekaligus menjadi pertemuan bilateral bersejarah bagi China karena pertemuan ini merupakan pertemuan bilateral terakhir Mao Zedong

dengan para kepala negara. Dalam pertemuan ini, kedua negara setuju untuk menandatangani kerjasama dalam bidang sains dan iptek. Akhir dekade 1970-an, hubungan bilateral China dan Pakistan semakin kuat, bahkan China memberikan asistensi militer kepada Pakistan sebesar US\$630 juta dan Pakistan menjadi negara tujuan bantuan militer terbesar kedua China sejak tahun 1958. Tahun 1978, China dan Pakistan juga bekerjasama dalam proyek *Karakoram Highway* (Dixit A. , 1987).

B. Dinamika Hubungan Bilateral China dan Pakistan Era Deng Xiaoping (1978-1990)

Tahun 1980-an di era pemerintahan presiden Deng Xiaoping, hubungan bilateral China dan Pakistan menunjukkan peningkatan. Hal ini ditandai oleh kunjungan kenegaraan baik Presiden maupun Perdana Menteri masing-masing negara dan beberapa perjanjian yang disepakati kedua pihak. Tahun 1982, kedua negara meresmikan *Khunjerab Pass*, yaitu sebuah akses yang juga menghubungkan wilayah bagian utara Pakistan dan wilayah Xinjiang. Tahun 1986, China dan Pakistan juga menandatangani kerjasama program nuklir bersama. Dalam sektor ekonomi, dibawah kepemimpinan Deng Xiaoping, angka perdagangan kedua negara meningkat. Sekitar dekade tahun 1960-1970, perdagangan kedua negara hanya mencapai angka masing-masing US\$18 juta di tahun 1960 US\$73 juta di tahun 1970. Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, perdagangan bilateral keduanya mampu mencapai angka US\$402 juta. Hingga di awal pemerintahan presiden selanjutnya, angka ini terus bertambah menjadi US\$424 juta di tahun 1990 (Malik D. A., 2013).

C. Dinamika Hubungan Bilateral China dan Pakistan Era Jiang Zemin (1990-2002)

Tahun 1990-an, merupakan dekade berakhirnya *Cold War* dan membawa perubahan besar dalam politik internasional, namun hubungan bilateral China dan Pakistan justru semakin meningkat. Tahun 1996, Presiden Jiang Zemin melakukan kunjungan kenegaraan ke Pakistan. Dalam kunjungan ini, kedua negara memutuskan untuk membangun kerjasama dalam berbagai bidang dalam rangka menghadapi tantangan abad ke-21. Presiden Jiang Zemin juga menyampaikan sebuah pidato yang berjudul “*Carrying Forward Friendly and Neighbourly Relations from Generation to Generation, and Working Together for a Better Tomorrow*” yang sekaligus menyampaikan kebijakan luar negeri China terhadap kawasan Asia Selatan. Masih di tahun yang sama, total angka perdagangan kedua negara pun mencapai US\$963.75 juta (Consulate-General of The People's Republic of China in Karachi, 2018).

Di abad ke-21, hubungan bilateral China dan Pakistan semakin berkembang. Awal tahun 2000, Presiden Pervez Musharraf melakukan kunjungan kenegaraan ke China. Kedua negara mendiskusikan masalah sanksi Amerika Serikat terhadap kebijakan nuklir Pakistan. Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama perdagangan bilateral (Mahmood, 2000). Tahun berikutnya, China dan India memperingati 50 tahun hubungan bilateral kedua negara. Dalam kesempatan ini, PM Zhu Rongji menyatakan bahwa China dan Pakistan akan melakukan kerjasama dalam proyek Gwadar Port dan mengutamakan perdamaian dan stabilitas kawasan sebagai prioritas China. Masih di tahun 2001, setelah peristiwa 9/11, Presiden Pervez Musharraf melakukan

kunjungan kenegaraan ke China dan bertemu dengan Presiden Jiang Zemin. Kedua kepala negara mendiskusikan keputusan Pakistan yang bergabung dengan aliansi pihak barat untuk berperang melawan terorisme global (BBC News, 2001).

Tahun 2003, PM Zafarullah Khan melakukan kunjungan kenegaraan ke China. Kunjungan ini menghasilkan sebuah perjanjian tentang program nuklir bersama. Masih di tahun yang sama, Presiden Pervez Musharraf kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke China dan bertemu dengan Presiden Jiang Zemin. Keduanya menandatangani sebuah deklarasi bersama tentang kerjasama kedua negara dalam berbagai bidang dan mendiskusikan isu terorisme.

D. Dinamika Hubungan Bilateral China dan Pakistan Era Hu Jintao (2002-2012)

Presiden Pervez Musharraf juga menghadiri forum BOAO yang diselenggarakan di Hainan, China. April 2005, PM Wen Jiabao melakukan kunjungan ke Pakistan dimana kunjungan ini menghasilkan dokumen "*Treaty of Friendship, Cooperation and Good Neighborly Relations*". Kedua negara juga menandatangani 21 perjanjian tentang kerjasama ekonomi. Tahun 2006, China dan Pakistan menandatangani *Pak-China Free Trade Agreement* dan kerjasama lainnya di berbagai sektor. Tahun 2008, kedua negara masih seperti kunjungan PM Yousaf Raza untuk menghadiri Olimpiade Beijing dan KTT ASEM dan kunjungan Presiden Asif Ali Zardari yang menghasilkan beberapa perjanjian kedua negara di sektor ekonomi, teknologi, perdagangan, agrikultur, dan komunikasi. Hingga tahun 2009, hubungan bilateral China dan Pakistan masih menunjukkan perkembangan yang cukup baik. April 2009, kedua negara terlibat dalam forum BOAO di Hainan. Di sela-

sela forum ini, PM Wen Jiabao juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Asif Ali Zardari. Masih dalam kunjungannya di China, Presiden Asif Ali Zardari juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Hu Jintao dan jajaran investor dari beberapa perusahaan besar China. Menjelang akhir tahun 2009, kedua negara menandatangani MoU tentang kerjasama dalam industri perikanan di provinsi Hangzhou dan Guangzhou serta terlibat dalam forum SCO.

Tahun 2010, hubungan bilateral China dan Pakistan masih ditandai dengan pertemuan pemimpin kedua negara dan kesepakatan dalam kerangka kerjasama di beberapa bidang dan dalam sektor perdagangan bilateral kedua negara mencapai US\$9.2 milyar. Tahun 2011, China dan Pakistan memperingati 60 tahun hubungan bilateral kedua negara dan sekaligus menjadi tahun *Pak-China Friendship Year*. Di tahun ini juga, beberapa sektor kerjasama kedua negara mengalami kemajuan yang cukup pesat, terutama sektor ekonomi, perdagangan, energi, pertahanan, budaya, olahraga, dan pendidikan. Tahun berikutnya, intensitas kunjungan kenegaraan dari masing-masing negara juga meningkat dan tidak hanya melibatkan Presiden atau Perdana Menteri saja, tetapi juga beberapa staf pemerintahan lainnya. Kedua negara juga masih terlibat dalam forum tahunan seperti forum BOAO dan SCO.

E. Dinamika Hubungan Bilateral China dan Pakistan Era Xi Jinping (2012-2017)

Di bawah pemeritahan Xi Jinping sejak akhir tahun 2012, hubungan bilateral China dan Pakistan mengalami peningkatan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertengahan tahun 2013, kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama ekonomi dalam kerangka CPEC atau *China-Pakistan Economic*

Corridor dengan nilai investasi sebesar US\$46 milyar yang menghubungkan Gwadar Port di Pakistan dan Laut Arab dengan Kashghar di Xinjiang, China. Masih di tahun yang sama, China dan Pakistan juga mengadakan pertemuan JCC atau *Joint Cooperation Commitee* dalam kerjasama CPEC untuk pertama kalinya di Islamabad (Global Times, 2013). Akhir tahun 2013, China juga mengumumkan komitmennya untuk membantu secara finansial sebesar US\$6.5 milyar kepada Pakistan dalam konstruksi proyek nuklir di Karachi dengan membangun dua reaktor dengan kapasitas sebesar 1.100 megawatt.

Awal tahun 2014, kedua negara menyelenggarakan pertemuan kedua JCC di Beijing dan dalam pertemuan ini kedua negara menyetujui studi kelayakan 16 proyek energi sebesar 21,000 *megawatt*. April 2014, PM Nawaz Sharrif melakukan kunjungan ke China untuk menghadiri forum BFA di Hainan, China. Bulan berikutnya, Presiden Mamnoon Hussain juga melakukan kunjungan ke China untuk menghadiri *Asia Summit* 2014 yang diselenggarakan di Shanghai. Agustus 2014, pertemuan ketiga JCC kembali diselenggarakan di Beijing dan pertemuan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan CPEC. Menjelang akhir tahun 2014, PM Nawaz Sharrif melakukan kunjungan kenegaraan ke China dan bertemu dengan PM Li Keqiang. Dalam kesempatan ini PM Li Keqiang menyampaikan bahwa China dan Pakistan merupakan negara sahabat dimana China selalu ingin meningkatkan hubungan bilateralnya dengan Pakistan. Selain itu, PM Li Keqiang juga menegaskan bahwa proyek CPEC akan membawa kontribusi besar bagi kedua negara di berbagai sektor. Selain itu, PM Nawaz Sharrif juga menyatakan bahwa hubungan bilateral China dan Pakistan juga merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Pakistan. PM Nawaz Sharrif berharap agar CPEC akan sekaligus mempromosikan

kerjasama pembangunan kedua negara dan kawasan (Ministry of Foreign Affairs of The People's Republic of China, 2011).

Maret 2015, pertemuan keempat JCC diselenggarakan di Beijing dan pertemuan ini merupakan penyelesaian proyek yang siap diserahkan kepada Presiden Xi Jinping. Bulan berikutnya, Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Pakistan. Kedua negara menyepakati 51 MoU termasuk di dalamnya kerangka proyek CPEC dengan nilai investasi US\$46 milyar. November 2015, pertemuan kelima JCC diselenggarakan di Karachi dengan agenda pertemuan yaitu peninjauan kembali terhadap rencana jangka panjang CPEC, perkembangan terhadap proyek infrastruktur dan energi, Gwadar Port, dan kerjasama keamanan dan industri. Desember 2016 kedua negara kembali menyelenggarakan pertemuan JCC yang keenam di Beijing. Dalam pertemuan ini, kedua negara sepakat untuk menambah proyek baru dalam kerangka CPEC. Pada pertengahan tahun 2017 PM Nawaz Sharrif menghadiri forum BRI atas undangan dari pemerintah China. Dalam forum ini, kedua negara mengadakan pertemuan bilateral. Agustus 2017, delegasi resmi China menghadiri peringatan 70 tahun kemerdekaan Pakistan.